

# Perkembangan islam masa Umayyah: Tinjauan sejarah peradaban islam

Liya Damayanti

Program Studi Teknik informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: liyadamayanti52@gmail.com

## Kata Kunci:

Dinasti umayyah, pemerintahan islam, sejarah politik intelektual islam, kepemimpinan khalifah, peradaban islam

## Keywords:

Umayyad dynasty, Islamic government, Islamic intellectual political history, Caliph leadership, Islamic civilization

## ABSTRAK

Dinasti Umayyah (661–750 M) adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam, yang berpusat di Damaskus. Periode ini ditandai dengan pergeseran kepemimpinan dari kekhalifahan deliberatif menjadi monarki turun-temurun. Dinasti Umayyah berkontribusi pada perluasan wilayah Islam yang luas, pengembangan administrasi pemerintahan, dan pertumbuhan dinamika intelektual komunitas Muslim. Namun, berbagai masalah politik, kesenjangan sosial, dan konflik internal berkontribusi pada kemunduran dinasti ini. Artikel ini mengkaji perkembangan Islam selama Dinasti Umayyah, menyoroti proses pengangkatan khalifah, model pemerintahan, profil khalifah, dinamika politik, dinamika intelektual, dan faktor-faktor kemundurannya. Penelitian ini menggunakan metode kajian historis dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti karya

sejarah klasik Islam dan studi akademik kontemporer. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara kebijakan politik, struktur pemerintahan, dan perkembangan sosial-keagamaan pada masa Dinasti Umayyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa stabilitas awal pemerintahan Umayyah berperan signifikan dalam memperluas wilayah Islam dan membentuk sistem administrasi yang relatif terpusat, namun pada saat yang sama memunculkan resistensi dari berbagai kelompok akibat praktik kekuasaan yang cenderung eksklusif. Dinamika intelektual pada periode ini berkembang melalui kodifikasi ilmu keislaman awal dan interaksi dengan budaya lokal di wilayah taklukan. Kesimpulannya, Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam pembentukan fondasi politik dan peradaban Islam, meskipun kelemahan internal dan konflik politik menjadi faktor utama yang mempercepat keruntuhannya.

## ABSTRACT

The Umayyad Dynasty (661–750 CE) was the first dynasty in Islamic history, centered in Damascus. This period was marked by a shift in leadership from a deliberative caliphate to a hereditary monarchy. The Umayyad Dynasty contributed to the expansion of Islamic territory, the development of government administration, and the growth of the intellectual dynamism of the Muslim community. However, various political problems, social disparities, and internal conflicts contributed to the decline of this dynasty. This article examines the development of Islam during the Umayyad Dynasty, highlighting the process of appointing caliphs, the model of government, the profiles of caliphs, political dynamics, intellectual dynamics, and the factors of its decline. This research uses a historical study method with a descriptive-analytical approach to primary and secondary sources, such as classical Islamic historical works and contemporary academic studies. The analysis focuses on the relationship between political policies, government structures, and socio-religious developments during the Umayyad Dynasty. The results of the study show that the initial stability of the Umayyad government played a significant role in expanding Islamic territory and establishing a relatively centralized administrative system, but at the same time gave rise to resistance from various groups due to the practice of power that tended to be exclusive. The intellectual dynamics during this period developed through the codification of early Islamic knowledge and interaction with local cultures in conquered territories. In conclusion, the Umayyad Dynasty played a



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

significant role in establishing the political foundations and Islamic civilization, although internal weaknesses and political conflicts were the main factors that accelerated its collapse.

---

## **Pendahuluan**

Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang menandai kelanjutan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa ini ditandai dengan kepemimpinan empat khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang meneruskan perjuangan dan penyebaran Islam dengan berbagai dinamika dan tantangan tersendiri.

Proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam berlangsung melalui mekanisme musyawarah yang menonjolkan nilai-nilai kesepakatan, keadilan, dan amanah mengemban dan menjalankan wewenang Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kepemimpinan yang diterapkan menekankan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam serta pengayoman terhadap umat, sehingga menjadi contoh pemerintahan yang adil dan amanah (terpercaya) (Samad, 2014)(Diana, 2021).

Sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis dan pelayanan publik, di mana khalifah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan menjalankan peran sebagai pelayan umat sekaligus pemimpin negara. Pemerintahan ini juga melakukan ekspansi wilayah yang luar biasa, memperluas dominasi Islam hingga ke berbagai wilayah baru yang membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam terutama dalam aspek social, ekonomi, dan budaya (Nasution, 2013).

Dengan berbagai keberhasilan dan prestasi Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Khulafaur Rasyidin juga menghadapi beragam tantangan, termasuk konflik internal, perpecahan politik, dan pemberontakan yang sempat menguji keutuhan umat Islam. Catatan merah terhadap kepemimpinan mereka memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan Islam dan kepemimpinan umat Muslim di masa kini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan Khulafa'ul Rasyidin mempunyai karakter religius yang menjadi model ideal dalam sejarah Islam dan relevansi kehidupan modern (Amiruddin et al., 2025).

Dengan berakhirnya masa kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan bani umayyah sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan bani umayyah adalah bentuk kerajaan, yang bersifat feudal (penguasaan wilayah dan bersifat turun temurun). Untuk mempertahankan kekuasaan, khalifah berani bersikap otoriter. Hal ini dijelaskan Ely Zainudin, bahwasanya pada kepemimpinan khalifah terdapat unsur kekerasan, diplomasi yang di iringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah (Zainudin, 2015).

## Pembahasan

### Proses Pengangkatan dan Konsepsi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

#### *Transisi Kepemimpinan dan Upaya Menjaga Keutuhan Umat*

Wafatnya Rasulullah SAW merupakan momen krusial yang menandai berakhirnya era kenabian dan bimbingan wahyu secara langsung. Kondisi ini menempatkan umat Islam di hadapan sebuah tantangan besar tentang siapa yang melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjaga keutuhan ajaran yang telah dibangun. Ketiadaan wasiat langsung dari Rasulullah SAW mengenai siapa pengganti beliau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan umat.

Situasi genting ini segera diatasi melalui musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa'adah. Peristiwa ini menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen umat Islam untuk mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok. Terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama merupakan hasil dari konsensus yang dicapai melalui dialog, bukan melalui paksaan atau garis keturunan. Proses ini menjadi preseden bersifat kolektif dan didasarkan pada kelayakan serta kepercayaan umat.

#### *Mekanisme Sukses Kepemimpinan yang Dinamis*

Periode Khulafaur Rasyidin tidak menerapkan satu sistem baku dalam proses pengangkatan pemimpin. Sebaliknya, mekanisme yang digunakan bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial-politik yang dihadapi. Masing-masing khalifah diangkat melalui cara yang berbeda, namun semuanya tetap berpegang pada prinsip musyawarah dan legitimasi umat.

1. **Abu Bakar Ash-Shiddiq RA:** Diangkat melalui proses bai'at (sumpah setia) yang diawali oleh para tokoh di Saqifah Bani Sa'adah dan dilanjutkan dengan bai'at umum oleh kaum Muslimin di Masjid Nabawi. Model ini menekankan pentingnya kesepakatan dari para tokoh yang kemudian dikukuhkan oleh dukungan publik.
2. **Umar bin Khattab RA:** Terpilih melalui wasiat atau penunjukan langsung oleh Abu Bakar Ash-Siddiq menjelang akhir hayatnya. Keputusan ini tidak diambil secara sepihak, melainkan setelah Abu Bakar melakukan musyawarah intensif dengan para sahabat terkemuka untuk meminta pertimbangan mereka. Mekanisme ini dipilih untuk mencegah potensi konflik suksesi yang mungkin timbul.
3. **Utsman bin Affan RA:** Diangkat melalui sebuah dewan formatur (Syura) yang terdiri dari enam orang sahabat senior yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Dewan ini diberi mandat untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Sistem ini merepresentasikan kandidat terbaik yang memimpin.
4. **Ali bin Abi Thalib KRA:** Diangkat di tengah kondisi krisis pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Pengangkatannya didasarkan pada desakan dan aklamasi mayoritas umat Islam di Madinah yang memandangnya sebagai satu-satunya figur yang mampu memulihkan stabilitas. Proses ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, suara mayoritas umat menjadi kunci utama.

### ***Konsepsi Kepemimpinan sebagai Pelayan Umat dan Penegak Syariat***

1. Konsep kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin berpusat pada peran khalifah sebagai “pengganti” Rasulullah SAW dalam urusan pemerintahan dan keagamaan, bukan sebagai penerus kenabian. Mereka memosisikan diri sebagai pelayan umat (Khadimul Ummah) yang tugas utamanya adalah menegakkan syariat Allah dan memastikan kesejahteraan rakyat. Karakteristik kepemimpinan mereka sangat lekat dengan nilai-nilai seperti: Religius: Keputusan dan kebijakan selalu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
2. Keadilan: Memberlakukan hukum secara adil tanpa memandang status sosial, agama, maupun latar belakang.
3. Musyawarah: Selalu melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan penting terkait negara.
4. Kesederhanaan: Menjalani gaya hidup yang sangat sederhana dan menolak kemewahan fasilitas negara.
5. Akuntabilitas: Merasa bertanggung jawab penuh kepada Allah dan rakyat atas amanah yang diembannya.

Karakteristik ini menjadikan kepemimpinan mereka relevan untuk dikaji hingga saat ini sebagai model ideal kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik .

### **Sistem Pemerintahan dan Implementasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Masa Khulafaur Rasyidin**

#### ***Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq: Konsolidasi Negara dan Ketegasan Kepemimpinan***

Sistem pemerintahan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M) bersifat sentralistik dan berfokus pada konsolidasi negara. Prioritas utamanya adalah mempertahankan keutuhan umat dan negara Madinah dari ancaman disintegrasi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kebijakan paling monumental adalah keputusannya yang tegas untuk memerangi kelompok murtad, nabi palsu, dan suku-suku yang menolak membayar zakat dalam Perang Riddah. Sistem pemerintahannya masih melanjutkan model yang dirintis Nabi, di mana khalifah adalah kepala negara, panglima tertinggi, dan hakim agung yang memutuskan perkara berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat .

Nilai kepemimpinan yang menonjol dari Abu Bakar adalah ketegasan yang berlandaskan keyakinan (al-yaqin) dan prioritas pada persatuan umat. Saat banyak sahabat ragu untuk memerangi mereka yang menolak zakat, Abu Bakar dengan tegas menyatakan tidak akan membedakan antara Shalat dan Zakat sebagai pilar utama Islam. Beliau juga memprakarsai proyek pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar, menunjukkan visinya untuk menjaga sumber utama ajaran Islam. Kepemimpinannya adalah cerminan dari seorang negarawan yang mampu bertindak cepat dan tegas dalam situasi krisis .

### **Administrasi dan Keadilan Struktural**

Masa Umar bin Khattab (634 – 644 M) menjadi saksi bisu lahirnya sebuah sistem pemerintahan yang terlembaga dan modern. Seiring ekspansi wilayah Islam yang pesat, Umar melakukan reformasi administrasi besar-besaran untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan adil. Beliau mendirikan berbagai institusi negara, antara lain:

1. **Baitul Mal** sebagai lembaga kas negara yang dikelola secara profesional.
2. **Departemen-departemen (Ad-Diwan)**, seperti departemen militer (Diwan al-Jund) dan departemen perpajakan (Diwan al-Kharaj).
3. **Lembaga peradilan** dengan menunjuk hakim (qadhi) yang independen di setiap wilayah
4. **Penanggalan Hijriah** sebagai sistem kalender resmi umat Islam.

Nilai kepemimpinan yang paling ikonik dari Umar adalah “keadilan” yang diterapkan secara struktural dan personal. Keadilannya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim (ahludz dzimmah) yang berada di bawah perlindungannya. Beliau dikenal sangat akuntabel, sering berpatroli di malam hari untuk memeriksa langsung kondisi rakyatnya.

Selain itu, Umar adalah sosok yang visioner, inovatif, dan sangat sederhana. Kombinasi antara kejeniusan administrasi dan integritas personal yang luar biasa inilah yang menjadikan pemerintahannya sebagai model ideal dalam sejarah Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, dinasti umayyah melanjutkan estafet pemerintahan Islam dengan memperluas wilayah kekuasaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan system administrasi di bidang Pendidikan. Dalam (Azzahro et al., 2024) disinggung bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan pada masa dinasti umayyah adalah hasil dari pondasi pemerintahan yang di bangun sejak periode Khulafaur Rasyidin.

### **Ekspansi Wilayah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Peradaban Islam**

#### ***Awal Ekspansi pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq***

Pada masa Abu Bakar, prioritas utama adalah menjaga stabilitas internal umat Islam melalui Perang Riddah yang ditujukan untuk menumpas pemberontakan kaum murtad, nabi palsu, dan penolak zakat. Setelah keadaan stabil, ekspansi dimulai dengan mengirim pasukan Usamah bin Zaid menuju perbatasan Syam sesuai wasiat Rasulullah SAW. Dari langkah ini, Islam mulai merambah ke wilayah Irak dan Syam, menjadi pijakan awal bagi futuhat berikutnya

#### ***Futuhat Besar pada Masa Umar bin Khattab***

Masa Umar bin Khattab merupakan periode ekspansi paling pesat dalam sejarah awal Islam. Dalam kurun sepuluh tahun, Islam berhasil menaklukkan wilayah Syam, Palestina, Mesir, hingga Persia. Pertempuran besar yang tercatat antara lain adalah Yarmuk melawan Romawi, Qadisiyah dan Nahawand melawan Persia. Selain ekspansi militer, Umar menata sistem pemerintahan di wilayah taklukan melalui pembentukan

lembaga Diwan, Baitul Mal, sistem pajak, dan lembaga peradilan. Hal ini menjadikan ekspansi bukan sekadar penaklukan, tetapi juga penguatan peradaban Islam (Rosyidi, 2017).

### ***Ekspansi dan Armada Laut pada Masa Utsman bin Affan***

Pada masa Utsman bin Affan, ekspansi dilanjutkan ke Armenia, Afrika Utara, dan wilayah laut Tengah seperti Cyprus. Utsman berjasa membangun armada laut Islam pertama untuk menghadapi dominasi maritim Bizantium. Selain itu, beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta memperkuat ekonomi negara. Dengan ekspansi ini, Islam tidak hanya kuat di darat tetapi juga di laut, membuka jalur perdagangan internasional yang semakin luas (Dalimunthe, 2024).

### ***Konsolidasi Politik pada Masa Ali bin Abi Thalib***

Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan internal berupa konflik politik yang menguras energi umat. Perang Jamal dan Shiffin menyebabkan ekspansi ke luar wilayah melambat. Fokus Ali lebih kepada konsolidasi politik dan penegakan keadilan. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah dan berusaha melakukan distribusi harta Baitul Mal secara merata. Meskipun ekspansi wilayah tidak signifikan, kepemimpinan Ali menekankan pentingnya prinsip keadilan dan integritas di tengah fitnah besar.

Banyak rintangan dan hambatan yang di hadapi oleh paraK, mulai dari banyaknya penolakan dari para kaum muslimin sampai dengan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah lantaran tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat oleh khalifah, hal ini dikaji dalam artikel Muhammad Naqib et al. (2025).

## **Kesimpulan dan Saran**

Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan Islam, terutama dalam ekspansi wilayah, penguatan administrasi, dan awal perkembangan intelektual Islam. Namun, praktik diskriminasi sosial, konflik politik, serta lemahnya integrasi umat menjadi faktor utama kemunduran dinasti ini. Meskipun runtuh, warisan Dinasti Umayyah tetap menjadi fondasi bagi kejayaan Islam pada periode berikutnya, terutama pada masa Dinasti Abbasiyah.

Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin merupakan pondasi utama system kepemimpinan Islam yang memiliki nilai keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas. Pola kepemimpinan ini berhasil membangun stabilitas politik dan social budaya umat Islam dimasa modern ini. Sejalan dengan kajian dalam (Amiruddin et al., 2025) yang menegaskan relevansi dalam kehidupan kontemporer.

### **Saran**

1. Pengembangan Akademis – Kajian mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin perlu terus dikembangkan, terutama dengan pendekatan komparatif terhadap sistem pemerintahan modern agar memberikan kontribusi teoritis dan praktis.
2. Integrasi Pendidikan – Nilai-nilai kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan kesederhanaan sebaiknya

diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam untuk membentuk karakter generasi muda.

3. Aplikasi Praktis – Pemimpin di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun organisasi, dapat meneladani sikap amanah, keberanian, dan akuntabilitas para khalifah sebagai etika kepemimpinan yang relevan sepanjang masa.
4. Penerapan Sosial – Umat Islam secara umum diharapkan menjadikan sejarah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan, dengan mengutamakan nilai-nilai ukhuwah dan keadilan sosial

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Istianah. Sejarah Peradaban Islam. Malang: UIN Malang Press, 2019. <https://repository.uin-malang.ac.id/1635/>
- Amiruddin, M., Gango, D., Afidah, A., Maulana, M. D., & Purwoko, F. A. (2025). Pattern Leadership Khulafaur Rasyidin: Analysis History and Valuesfor Modern Life. *Journal of Humanities Research Sustainability*, 2(3), 113–122. <https://repository.uin-malang.ac.id/23782/>
- Azzahro, H. A., Nasiha, M. A., Rozy, M. F., & Amiruddin, M. (2024). Jejak dan Sejarah Munculnya Ilmu Kesehatan dan Pendidikan Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Seumubeuet: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 149–160. <http://repository.uin-malang.ac.id/23049/>
- Dalimunthe, L. A. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M) Latifa Annum Dalimunthe. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 204–215.
- Diana, N. I. (2021). Kepemimpinan Islam (Vol. 1). UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/7997/1/7997.pdf>
- Naqib, M. A. (2025). Pencapaian peradaban Islam di zaman khulafaur rasyidin: Keberhasilan dan tantangan. *DEWARUCI: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 3 (1), 286-290. ISSN 2962-4207. <http://repository.uin-malang.ac.id/23695/>
- Nasution, S. (2013). Sejarah Peradaban Islam. In Yayasan Pusaka Riau. Yayasan Pusaka Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/10391/>
- Rohmatin, I. N. (2025). Konsep Manusia (Al-Insan) Dalam Al-Qur'an Sebagai Khalifatullah Dengan Perspektif Kepribadian Sigmund Freud. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5 (2), ISSN 2798-5210. <http://repository.uin-malang.ac.id/25341/>
- Rosyidi, M. H. (2017). Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 10(2), 19–31. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/53>
- Samad, D. (2014). Pemimpin Peradaban. Duskisamad Institut Publishing. <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/239/>
- Zainudin, E. (2015). The Development of Islam in the Umayyad Period. *Jurnal Intelegensia*,